

SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA DAERAH DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**LUTHFI ARI SUHANDANA
NIM. 160604088**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Luthfi Ari Suhanadana
NIM : 160604088
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



[Handwritten Signature]
Luthfi Ari Suhandana

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

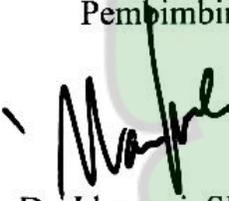
Luthfi Ari Suhandana

NIM. 160605088

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Idaryani, SE., M.Si

NIDN. 0105057503


Safnina Sukma, SE., M.Si

NIP. 198708102019032013

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Ekonomi, 

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si

NIP. 197204281999031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh

Luthfi Ari Suhandana
NIM. 160604088

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2020 M
7 Muharram 1442 H

Banda Aceh

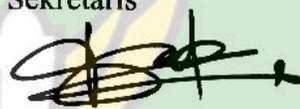
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua



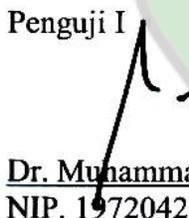
Dr. Idaryani, SE., M.Si
NIDN. 0105057503

Sekretaris



Safnina Sukma, SE., M.Si
NIP. 198708102019032013

Penguji I



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II



A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luthfi Ari Suhandana
NIM : 160604088
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : luthfi.ari28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Mengetahui,

Penulis

Luthfi Ari Suhandana
NIM. 160604088

Pembimbing I

Dr. Idaryani, SE., M.Si
NIDN. 0105057503

Pembimbing II

Safnina Sukma, SE., M.Si
NIP. 198708102019032013

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan Kesanggupannya.”(Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)." (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang jasanya tidak akan pernah dapat terbalaskan sepanjang masa serta kepada kakak dan adikku tersayang yang telah menjadi mentari dikala diri ini berada dalam kelamnya kegelapan. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun dikala susah.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI ACEH**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moral maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Idaryani SE., M.Si. selaku pembimbing I dan Safnina Sukma, SE., M.Si. selaku pembimbing II yang dengan kesabarannya dan juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga kemudian pemikirannya dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku penguji I dan A. Rahmat Adi, SE., M.Si selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran yang baik dalam skripsi saya.
6. Evri Yenni SE., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi. Seluruh dosen, karyawan, serta staf akademik maupun tata usaha Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis.

7. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Syukri. H dan Ibu Aruni Cahyanti, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dorongan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis hingga skripsi ini selesai. Serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Senior terbaik Aditya Putra Pratama, SE dan Dewi Masitoh Daulay, SE yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat luar biasa dalam penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 terutama untuk Sri Adelvi Lubis, Ade Putri Utami, dan Bustami yang turut membantu serta memberi saran-saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

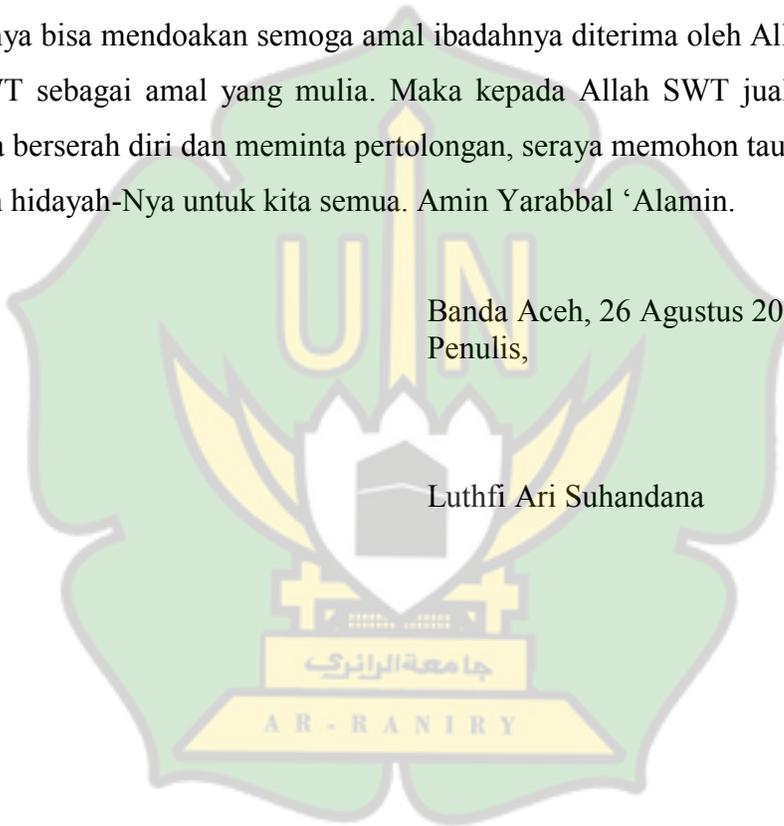
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semog

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan masyarakat yang terkait khususnya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 26 Agustus 2020
Penulis,

Luthfi Ari Suhandana



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف
haura : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

Qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Luthfi Ari Suhandana
NIM : 160604088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja
Daerah Di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Idaryani, SE., M.Si
Pembimbing II : Safnina Sukma, SE., M.Si

Pembangunan pada suatu wilayah merupakan komponen yang menyeluruh melalui ekspansi atau pembangunan nasional yang dikerjakan melalui dasar otonomi daerah. Hal ini dituang dalam peraturan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggara otonomi daerah. Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dari pemerintah daerah diantaranya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang di dalamnya terdapat Dana Alokasi Umum dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh, baik itu secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan berupa data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah Provinsi Aceh selama 10 tahun, dari tahun 2010 sampai 2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Aceh. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Kemudian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh tahun 2010-2019. Diharapkan untuk pemerintah agar terus meningkatkan penerimaan pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah supaya menciptakan kemandirian daerah, selain itu pemerintah daerah provinsi Aceh juga harus mengelola Dana Lokasi Umum dengan tepat sasaran.

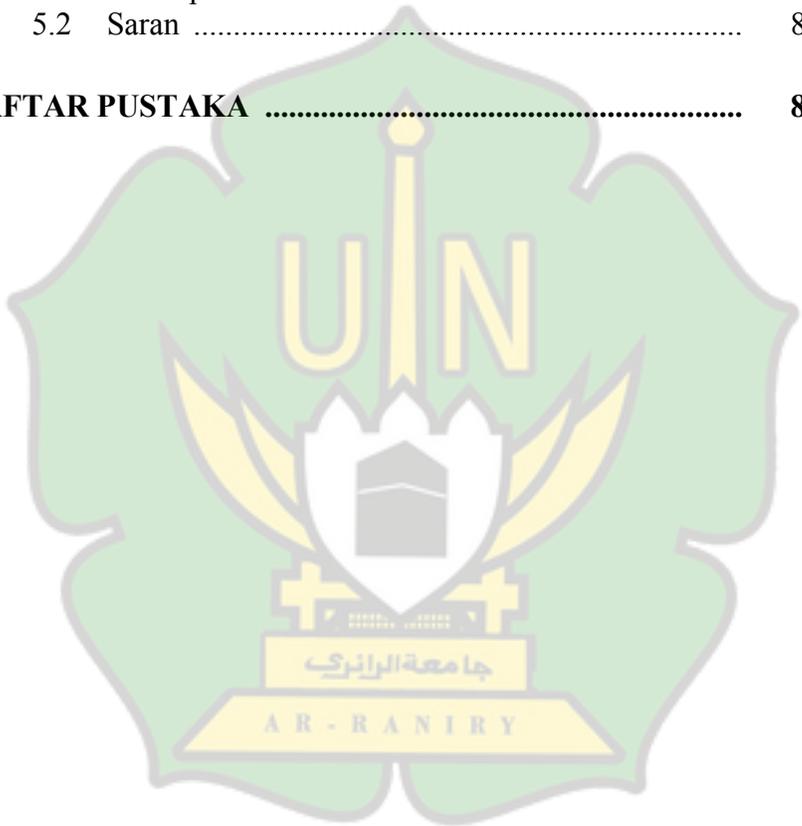
Kata Kunci: **Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tinjauan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Otonomi Daerah	14
2.2 Konsep Anggaran Pemerintah	20
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	22
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.5 Belanja Daerah	28
2.6 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah	30
2.7 Pengaruh PAD terhadap Belanja Darah	31
2.8 Penelitian Terdahulu	32
2.9 Kerangka Berfikir	46
2.10 Hipotesis	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Rancangan Penelitian	48
3.2 Jenis Data	48
3.3 Variabel Penelitian	49
3.3.1 Klasifikasi Variabel Penelitian	49
3.3.2 Devinisi Operasional Variabel	49
3.4 Metode Pengumpulan Data	50
3.5 Model Analisis	51
3.5.1 Regresi Linier Berganda	51
3.6 Uji Asumsi Klasik	52
3.6.1 Uji Multikolinearitas	52
3.6.2 Uji Heteroskedastisitas	53
3.6.3 Uji Autokorelasi	53
3.6.4 Uji Normalitas	54
3.7 Pengujian Hipotesisi	54
3.7.1 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	54
3.7.2 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	55
3.7.3 Koefisiensi Determinasi (R Square)	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Penelitian	57
4.2 Deskripsi Penelitian	59
4.2.1 Dana Alokasi Umum (DAU)	60
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	61
4.2.3 Belanja Daerah	64
4.3 Metode Analisa Data	68
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda	68
4.3.2 Uji Asumsi Klasik	70
1 Uji Multikolinearitas	70
2 Uji Heteroskedastisitas	71
3 Uji Autokorelasi	73
4 Uji Normalitas	75
4.3.3 Pengujian Hipotesis	76
1 Uji F (Simultan)	76
2 Uji t (Parsial)	78
3 Uji Koefisien Determinasi (R Square) ...	80

4.4	Pembahasan	81
4.4.1	Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah ..	81
4.4.2	Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah ...	82
4.4.3	Pengaruh DAU dan PAD Terhadap BD	84
BAB V	PENUTUP	86
5.1	Kesimpulan	86
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2018-2019	7
Tabel 1.2	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2019	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019.....	58
Tabel 4.2	Jumlah DAU, PAD dan Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2019	59
Tabel 4.3	Data Dana Alokasi Umum dan Laju Peningkatan Provinsi Aceh Tahun 2010 Sampai 2019	60
Tabel 4.4	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 2010 Sampai Tahun 2019.....	62
Tabel 4.5	Jumlah Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2010 sampai 2019	65
Tabel 4.6	Regeresi Linier Berganda	68
Tabel 4.7	Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.8	Uji Heteroskedastisitas	72
Tabel 4.9	Uji Autokorelasi	74
Tabel 4.10	Uji Normalitas	75
Tabel 4.11	Uji F (Simultan)	77
Tabel 4.12	Uji t (Parsial)	79
Tabel 4.13	Uji Koefisien Determinasi (R Square)	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir	46
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Aceh	57



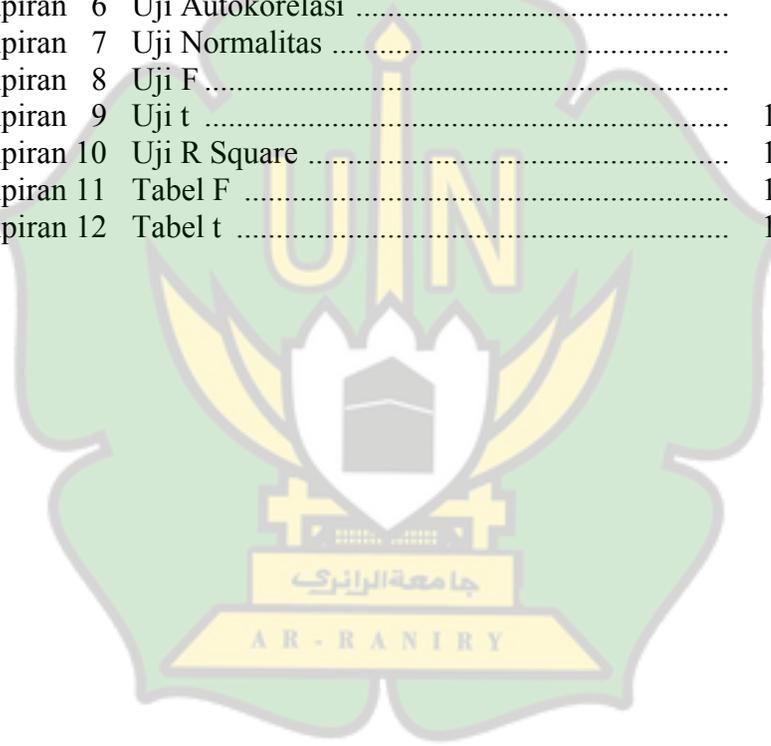
DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
DAU	: Dana Alokasi Umum
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
BD	: Belanja Daerah
UU	: Undang-undang
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data DAU, PAD, dan Belanja Daerah Tahun 2010 sampai 2019	94
Lampiran 2 Data Interpolasi	95
Lampiran 3 Uji Regresi Linier Berganda	97
Lampiran 4 Uji Multikolinearitas	98
Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas	98
Lampiran 6 Uji Autokorelasi	98
Lampiran 7 Uji Normalitas	99
Lampiran 8 Uji F	99
Lampiran 9 Uji t	100
Lampiran 10 Uji R Square	100
Lampiran 11 Tabel F	101
Lampiran 12 Tabel t	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada suatu wilayah merupakan komponen yang menyeluruh melalui ekspansi atau pembangunan nasional yang dikerjakan atas dasar otonomi daerah, serta peluang untuk meningkatkan kerakyatan serta kualitas suatu wilayah yang diberikan melalui aturan sumber daya nasional, bertujuan agar dapat memberikan peningkatan untuk membangkitkan keinginan, dan juga ketenteraman masyarakat, lalu fungsi, serta aktif secara ideal dan juga terpadu. Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah merupakan suatu bagian dari pemerintahan pusat yang bertujuan terhadap peningkatan keberhasilan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan serta bantuan terhadap rakyat dan juga bertambahnya keinginan rakyat dimasa perubahan terhadap pelayanan masyarakat yang hemat, baik, benar, terbuka, bertanggung jawab dan peduli. (Kolinug, Kumenaung, & Rotinsulu, 2015)

Seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentrali fiskal kemajuan daerah-daerah yang ada di Indonesia bertumbuh semakin pesat. Permasalahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pembagian keuangan ditimbulkan dari penerapan *decentralize* yang juga merupakan bentuk dari otonomi daerah, dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan

dukungan pendanaan. Hal ini dituang dalam peraturan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Perimbangan mengenai keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah pusat akan ideal jika disetiap pemerintahan bebas dalam pembiayaan untuk menjalankan otoritas dan kewajiban sendiri-sendiri akan dapat menciptakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ideal. Hal ini menunjukkan jika dana yang didistribusikan kepada pemerintah provinsi dari pemerintah pusat mengalami pengurangan maka pemerintah provinsi akan menggunakan pendapatan dari daerah untuk dijadikan sumber pembiayaan utama pada wilayah tersebut.

Pelaksanaan desentralisasi pada penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki kaitan yang erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan nilai tambah didalam penyelenggaraan pemerintahan, maka peran pemerintah pusat dialihkan ke pemerintahan yang ada di provinsi melalui pelaksanaan desentralisasi. Tujuan tersebut akan tercapai maka memerlukan kematangan pada bidang pendanaan yang lumayan tinggi, agar suatu provinsi bisa meningkatkan beragam kualitas dan peluang pada sumber-sumber pemasukan suatu provinsi.

Rancangan aktivitas keuangan tahunan pada pemerintah daerah yang disahkan oleh DPRD disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga

menggambarkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk sebuah program yang rincian kegiatannya serta praktek-prakteknya dilakukan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dengan disertai prakiraan biaya yang diperlukan serta pendapatan yang direncanakan untuk membiayainya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah pada umumnya dipengaruhi oleh pemberian pemerintah pusat, yang diatur melalui kebijakan yang mengakibatkan suatu wilayah memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat.

Sumber pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dari pemerintah provinsi diantaranya terdapat pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, kemandirian pada provinsi juga akan meningkat, diikuti dengan dana atau pemasukan daerah juga akan meningkat, kemudian setiap pemerintah daerah akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui keunggulan-keunggulan daerah (Tambunan, 2006). Hal ini akan memperlihatkan jika suatu daerah memiliki potensi PAD yang tinggi akan dapat membelanjakan atau melakukan belanja daerah yang tinggi juga. (Devita, Delis, & Junaidi, 2014)

Kaitan Pendapatan Asli Daerah dengan belanja pemerintah dapat melahirkan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. Iuran langsung atas masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya merupakan beberapa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat berupa memberikan pelayanan publik yang bagus terhadap masyarakat menggunakan anggaran belanja daerah, maka dari itu masyarakat juga memiliki tanggung jawab dengan menyumbangkan kemampuannya kepada pemerintah daerah seperti pajak. Kemudian pemerintah juga akan melayani rakyat setempat berupa memberikan fasilitas yang memadai baik itu fasilitas langsung maupun tidak langsung di daerahnya seperti pengadaan infrastruktur yang dibiayai dari bagian anggaran belanja daerah dalam APBD tiap tahunnya. Dari hal tersebut terdapat kaitan PAD terhadap pengeluaran provinsi. Namun tidak semua daerah yang memiliki pendapatan cukup baik akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. (Susanti & Fahlevi, 2016)

Sumber pendanaan yang lainnya terdapat pada dana perimbangan, dimana dana perimbangan juga berperan penting bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia dikarenakan kontribusinya yang sangat tinggi. Bagi hasil dari pajak dan bagi hasil SDA merupakan poin dari Dana Bagi Hasil, selain itu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang sumbernya berasal dari transfer pemerintah pusat merupakan bagian dari Dana perimbangan. Menurut Bastian (2003), Dana perimbangan dalam

rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan Dana Alokasi Umum. Kemudian Halim (2002) berpendapat bahwa, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai keperluan belanja daerah melalui penerapan desentralisasi. (Ernayani, 2017)

Hubungan DAU dengan belanja pemerintah daerah adalah dimana pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja daerah bertujuan untuk mengembangkan fasilitas publik. Adapun yang membedakan PAD dan juga DAU ialah jika PAD bersumber melalui penghasilan yang didapat dari wilayah tersebut, kemudian DAU bersumber melalui kiriman pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Menurut Darise (2009), menerangkan bahwa DAU ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan daerah dan mendanai kebutuhan daerah melalui pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan supaya pemerataan dan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah dengan pengaplikasian formula yang mempertimbangkan keperluan dan kapasitas daerah. Permasalahan yang terdapat pada dana alokasi umum ketika pemerintah daerah meminta dana alokasi umum tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Aceh adalah salah satu daerah provinsi di Indonesia yang memiliki pendapatan melalui otonomi khusus pada UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah mengalokasikan Dana Otonomi khusus untuk Aceh (sempat berganti nama menjadi Nangroe Aceh Darussalam/NAD) sejak tahun 2006 untuk jangka waktu 20 tahun setelah Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disahkan.

Bagian pendapatan pada sumber daya minyak dan gas ialah 70%. Ketentuan ini melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan provinsi hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas. Pemberian otonomi dan jumlah pendapatan yang cenderung besar ini diharapkan bisa memajukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Aceh yang jauh tertinggal dibandingkan kemajuan ekonomi provinsi lain di Indonesia, yang pada akhirnya pencapaian tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dana Otonomi khusus pertama kali dikucurkan pada tahun 2008. Besaran Dana Otonomi khusus untuk tahun pertama sampai kelima belas adalah 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Kemudian pada tahun kelima belas hingga kedua puluh adalah 1% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional (BPS, 2013-2017).

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Provinsi Aceh Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2018-2019 (Juta Rupiah)

No	Jenis Pendapat/ <i>Kind of Revenues</i>	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/<i>Regional Revenue</i>	2.359.385,65	2.481.629,95
1.1	Pajak Daerah/ <i>Regional Tax</i>	1.309.082,53	1.509.791,99
1.2	Retribusi Daerah/ <i>Regional Retribution</i>	20.763,45	28.864,00
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ <i>Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>	181.654,58	196.935,86
1.4	zakat/ <i>Infaq</i>	53.929,35	50.248,00
1.5	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>	793.958,74	695.791,10
2	Dana Perimbangan/<i>Balance Funds</i>	12.065.902,56	13.020.620,21
2.1	Bagi Hasil Pajak/ <i>Tax Sharing revenue</i>	159.604,17	184.977,00
2.2	Bagi Hasil Bukan Umum/Sumber Daya Alam/ <i>Non-Tax Sharing revenue/Natural Resources</i>	32.289,78	44.627,21
2.3	Dana Alokasi Umum/ <i>General Allocation Fund</i>	2.060.263,00	2.126.194,00
2.4	Dana lokasi Khusus/ <i>Special Allocation Fund</i>	1.483.636,66	1.826.272,00
2.5	Dana Tambahan bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi	0	0
2.6	Dana Otonomi Khusus	8.029.792,00	8.357.472,00
2.7	Dana Penyesuaian	300.318,95	481.079,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah/<i>Other Revenue</i>	2.496,60	22.663,00
3.1	Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar	0	0
3.2	Pendapatan Hibah/ <i>Grant</i>	2.496,60	22.663,00
3.3	Lainnya/ <i>Others</i>	0	0
	Jumlah/<i>Total</i>	14.427.783,80	15.524.912,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh 2018-2019

Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh dari tahun 2018-2019 terjadi peningkatan selama satu tahun terakhir, dari 14,4 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 15,5 triliun rupiah pada tahun 2019. Belanja daerah Aceh yang berjumlah belasan trilyun pertahun harus dicermati untuk melihat apakah pengeluaran yang dilakukan sejalan dengan amanat pembangunan nasional dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Tabel 1.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2018-2019 (Juta Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	2018	2019
1	Belanja Tidak Langsung	3,921,683	6,613,785
1.1	Belanja Pegawai	2,252,421	2,534,904
1.2	Belanja Subsidi	0	0
1.3	Belanja Hibah	693,406	671,513
1.4	Belanja Bantuan Sosial	228,273	12,542
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/Desa	642,408	691,397
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Desa	105,125	2,647,231
1.7	Belanja Tidak Terduga	49	56,197
2	Belanja Langsung	8,384,623	10,491,723
2.1	Belanja Pegawai	617,005	784,271
2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,263,677	6,083,407
2.3	Belanja Modal	2,503,941	3,624,044
	Jumlah/Total	12,306,306	17,105,507

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh 2018-2019

Realisasi Pengeluaran Belanja Daerah Provinsi Aceh dari tahun 2018-2019 terjadi peningkatan selama satu tahun terakhir, dari 12,3 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 17,1 triliun rupiah pada tahun 2019. Adanya jumlah Belanja Daerah ini akan dipengaruhi oleh Pendapatan dari Provinsi Aceh.

Kolinug, Kumenaung, & Rotinsulu (2015), menyatakan bahwa jumlah estimasi Regresi Berganda, memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Daerah, selain itu Dana Alokasi umum (DAU) juga memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Prakosa (2004), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa secara empiris penelitian ini terbukti bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang didapat melalui Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

Begitu juga menurut Suprayitno (2015), menerangkan dalam penelitiannya bahwa hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi pada Pulau Jawa. Devita, Delis, & Junaidi (2014), menyatakan bahwa ketika dilihat dari pengaruhnya dengan menggunakan model fixed effect, dapat diamati bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama dan parsial memiliki pengaruh yang signifikan atau dapat menambah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sedangkan menurut Ernayani (2017), menyatakan

dimana hasil penelitian memperlihatkan bahwa; Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka menjadi dasar pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, dengan demikian penulis mengangkat persoalan di atas sebagai permasalahan yang akan di teliti, dengan judul ***“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh.
- b. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh.
- c. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama terhadap terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ialah:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama terhadap terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini antara lain:

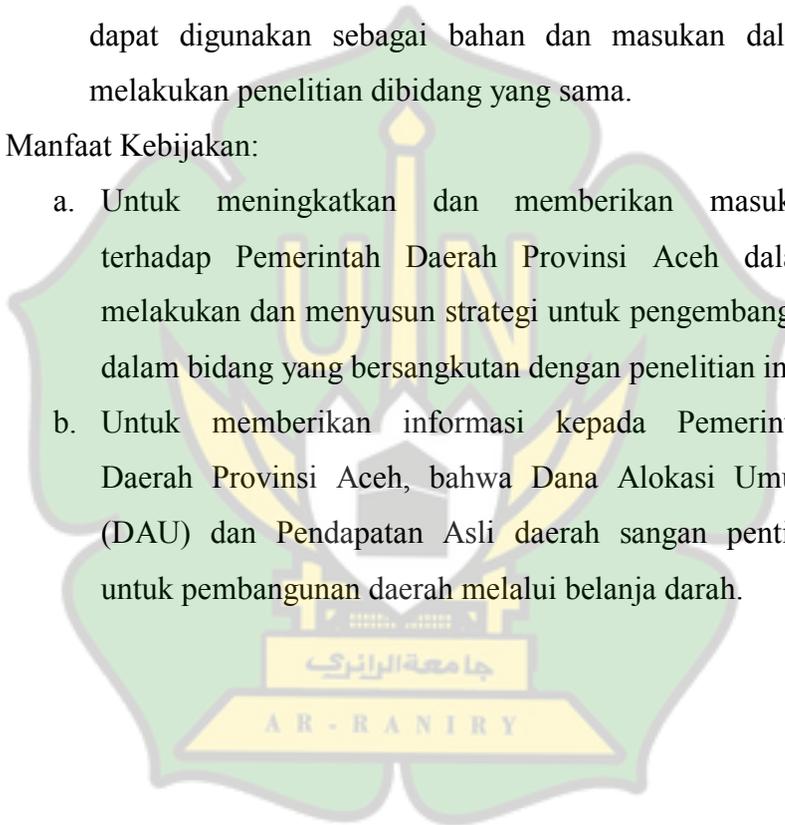
1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa menyajikan cerminan cukup jelas tentang pendistribusian beragam kapasitas dan sumber daya pada sebuah provinsi agar dapat memenuhi sarana bagi kemakmuran masyarakat.
 - b. Untuk peneliti, berguna untuk penambahan ilmu dan pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis :

- a. Untuk meningkatkan keilmuan serta untuk dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.
- b. Bagi penelitian kedepannya, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dan masukan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

3. Manfaat Kebijakan:

- a. Untuk meningkatkan dan memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dalam melakukan dan menyusun strategi untuk pengembangan dalam bidang yang bersangkutan dengan penelitian ini.
- b. Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli daerah sangat penting untuk pembangunan daerah melalui belanja darah.



1.5. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga sistematika penelitian

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bagian ini memuat uraian mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema skripsi.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan secara jelas dan rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta justifikasinya, jenis penelitian, lokasi, jenis data, metode pengumpulan data, serta analisis penelitian yang digunakan.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil penelitian, klasifikasi pembahasan sesuai pendekatan, sifat penelitian, dan rumus masalah atau fokus penelitian.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu sendiri menyajikan secara ringkasseluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan saran merupakan rumusan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu hak, wewenang, serta kewajiban daerah, otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam pemerintah daerah.

Otonomi daerah merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan dari daerah dalam menata dan membenahi apa yang dipentingkan oleh rakyat untuk menuju pemikiran pribadi, berdasarkan keinginan rakyat yang berdasarkan ketetapan pada aturan. Proses kontribusi kewenangan otonomi kepada suatu wilayah berlandaskan asas *desentralisasi* dalam corang yang besar, jelas, dan berkewajiban. (Aggeraini & Suhardjo, 2010)

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari otonomi daerah diantaranya kemampuan keuangan (*finansial*), keterampilan dalam mengelola, kondisi sosial-budaya masyarakat dan karakteristik *ekologis*, Riwo Kaho mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi dan menentukan pelaksanaan dari otonomi daerah yaitu: (Salam, 2004) :

- a. Sumber daya manusia, kesanggupan aparatur dan ikut serta masyarakat.
- b. Keuangan yang baik pada pendapatan asli daerah itu sendiri.
- c. Peralatan yang memadai dan mendukung
- d. Pengelolaan organisasi yang baik

Menurut *Smith* (Salam, 2004), keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat dalam tugas maupun fungsi pemerintahan, keterampilan dalam pengambilan pajak daerah, besarnya anggaran belanja, jumlah pelimpahan wewenang, bidang tugas administrasi, wilayah, ketergantungan keuangan dan personil. Melalui otonomi daerah, diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing antar daerah dengan memperhatikan unsur pemerataan, demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Supriyatno, 2015)

Dalam hal ini, yang menjadi rujukan dalam aturan ialah Undang-undang Dasar 1945 yang ditetapkan rancangan awal mengenai pemberlakuan otonomi pada suatu wilayah, namun kemajuan pada sejarah, konsep otonomi daerah tersebut masih

terdapat beberapa alterasi rupa yang diakibatkan oleh besarnya pengaruh petinggi-petinggi pada masanya. Jika otonomi daerah berkembang dapat dijabarkan sejak tahun 1945, dapat tampak beberapa peralihan ide-ide otonomi yang dibuat oleh pakar politik pada masa itu yang memiliki kuasa. Persoalan ini dapat dilihat pada hukum-hukum pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945
Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1945
Mulai tahun ini, Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957
Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat.
4. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959
Pada masa ini, kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui Penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan Pamong Praja.

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965

Pada masa ini, kebijakan otonomi daerah menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.

6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974

Setelah terjadinya G30S PKI, pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru, maka pada masa berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapannya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.

7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Selaku cara dalam menggapai arah dari wilayah tersebut disodorkan kewenangan untuk melaksanakan tujuan yang dimaksud, maka kepada daerah yang telah diberi wewenang agar dapat melaksanakan tujuan berbagai urusan rumah tangga dan perekonomiannya sendiri. Otonomi daerah memberikan dua keterlibatan kewajiban istimewa terhadap pemerintah disuatu wilayah diantaranya, pertama biaya perekonomian yang meningkat (*high cost economy*), kedua berupa pencapaian serta arah sebuah tujuan. Maka dari itu, desentralisasi memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk melakukan ekspansi disuatu wilayah. (Simanjuntak, 2017)

Desentralisasi merupakan wujud dari otonomi daerah, dalam penerapannya pengalokasian dana kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat terdapat beberapa permasalahan pada tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan sangat diperlukan berupa sokongan dalam bidang pembiayaan. Pembagian dalam bidang pendanaan dari pemerintah pusat dikatakan ideal jika pelaksanaan dalam membiayai kewajiban

dan tugas dalam suatu pemerintahan dibagian keuangan dapat dikerjakan secara independen atau bebas. Selain itu seiring berjalannya otonomi daerah, dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat masih belum cukup, maka pemerintah daerah harus menjadikan pendapatan dari daerah sendiri sebagai sumber utama dalam pembiayaan.

Seorang Vincent Lemius berpendapat bahwa, Otonomi Daerah merupakan suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat dan mengambil keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan yang tertera dalam perundang-undangan. Otonomi daerah, didalamnya mempunyai suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengetahui apa yang menjadi keperluan daerahnya, namun keperluan lainnya dari daerah tersebut masih juga harus disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan nasional sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mariun juga berpendapat bahwa, Otonomi Daerah merupakan suatu kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri dalam mengelola serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya, sehingga Otonomi daerah dapat disebut sebagai suatu kewenangan atau kebebasan untuk dapat bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada daerah itu sendiri.

2.2. Konsep Anggaran Pemerintah

Fakta membuktikan bahwa secara keseluruhan pemerintah disuatu wilayah belum dapat terpisah terhadap tanggung jawab dari pemerintah pusat, penyebabnya karena tiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh dari itu, pemerintah pusat juga belum dapat melepastanggung jawab terhadap kewenangan otonomi yang berlaku. Namun tidak hanya kondisi ikatan politik dan otoritas daerah yang dapat terlibat, tetapi tampak juga pada ikatan dibidang pendana antara pemerintah pusat dan provinsi. (Simanjuntak, 2001), dalam (Setiawan, 2010).

Pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna ditunjukkan untuk kepentingan daerah disebut juga dana perimbangan. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dana yang berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) dengan tujuan membiaya keperluan suatu wilayah disebut juga dana perimbangan. Banyaknya dana perimbangan yang disahkan dalam periode per tahun terdapat pada APBN. Peningkatan pada pendapatan daerah juga dapat diambil melalui dana perimbangan dan juga pendapatan asli disuatu provinsi. Kuncoro (2007) menyatakan bahwa PAD hanya mampu memberi belanja pemerintah daerah paling besar sekitar 20%. Dana perimbangan terbagi dalam beberapa bagian yaitu: DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil). Dana Perimbangan digunakan sebagai:

1. Jaminan adanya perbandingan secara *vertikal* pada bidang keuangan antar pemerintahan.
2. Jaminan adanya perbandingan secara *horizontal* pada bidang keuangan antar pemerintah yang sama tingkatannya.
3. Jaminan untuk terlaksanakan kegiatan tertentu di daerah yang searah dengan kegiatan nasional.

Pada umumnya, DAU merupakan dana yang sering dikirimkan oleh pemerintah pusat. Nyatanya jumlah dari DAU pada pendapatan disuatu wilayah terbilang cukup tinggi dibanding pendapatan yang lain dari provinsi, termasuk didalamnya pemasukan yang berasal dari daerah itu sendiri

Berhubungan perihal tersebut, suatu wilayah memiliki fungsi yang cukup berpengaruh dalam mengalokasikan pengeluaran provinsi guna untuk peningkatan pada perolehan wilayah itu sendiri. Cara dalam meningkatkan kinerja khalayak untuk perolehan suatu wilayah, sebaiknya penyaluran belanja modal harus diletakkan. Pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pelaksanaan belanja modal terdapat beberapa diantaranya: peningkatan infrastruktur, memperbaiki bidang pendidikan, kesehatan dan transportasi. Agar rakyat bisa merasakan fungsi dari pemangungan tersebut. Maka, tidak akan masuk akal apabila suatu anggaran belanja modal masih kurang dari belanja rutin. (Abimanyu, 2005) dalam (Setiawan, 2010). Apabila pendapatan yang diperoleh dari sebuah wilayah, mulai dari DAU ataupun pendapatan daerah sendiri, maka wilayah tersebut dapat mencukupi

serta membiayai segala yang diperlukan dan diinginkan oleh penduduk daerah itu sendiri.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang suatu sistem yang pembiayaan pemerintahnya dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan itu disebut dalam hal pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Sebenarnya perolehan dana yang berasal dari bagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan itu merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pengiriman dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah disuatu wilayah bertujuan agar menghindari celah fiskal (*fiscal gap*) dan meratakan kesanggupan fiskal suatu wilayah, guna membantu independensi suatu pemerintah daerah pada pelaksanaan fungsi serta haknya dalam memberikan pelayanan kepada rakyat merupakan pengertian Dana Alokasi Umum, dimana DAU pada umumnya merupakan bagian dari dana perimbangan dari penerimaan APBN, kemudian disalurkan terhadap wilayah untuk

membayai apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan *decentralisasi*. (Kolinug, Kumenaung, & Rotinsulu, 2015)

Menurut pendapat (Halim, 2002), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*.

Dari yang dijelaskan sebelumnya, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang penting dan mengharuskan suatu wilayah untuk dapat menjadikan hasil pendapatan yang penting melalui pembiayaan yang di terima dari APBN. Maka dari itu penerimaan DAU difungsikan sebagai control pemerintah terhadap pendapat daerah guna memperoleh beberapa kaitan yang lebih tinggi terhadap keuangan Negara.

Ketika hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang di mulai sejak 01 Januari Tahun 2001, oleh karena itu pemerintah daerah mendapatkan wewenang cukup besar, dan bertanggung jawab serta nyata dalam mengatur dan menata daerahnya sendiri.

Menurut pendapat Mardiosmo (2004), Dalam menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah, Dana Alokasi Umum perlu membagi serta melihat potensi

daerah, kebutuhan pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Faktor pemerataan fiskal merupakan salah satu dari fungsi yang dimiliki oleh DAU. Faktor yang dipengaruhi terhadap banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum terhadap setiap daerah merupakan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Prinsip pengalokasian dana pada DAU yaitu apabila daerah yang memiliki potensi fiskalnya cukup besar, namun apa yang dibutuhkan tergolong kecil, maka akan menerima Dana Alokasi Umum yang relative rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila potensi daerah kecil, sementara yang dibutuhkan cukup besar, maka daerah tersebut akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relative besar.

Adapun literatur dalam penghitungan DAU berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan DAU sedikitnya 25% atas pemasukan negara yang telah ditetapkan dalam APBN.
2. DAU terhadap wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sesuai dengan ketentuan diatas.
3. DAU pada suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan sesuai dengan yang dikalikan dari jumlah DAU terhadap daerah kabupaten/kota yang ditetapkan pada APBN dengan jumlah di daerah kabupaten/ kota terkait.

4. Jumlah daerah kabupaten/kota sesuai yang diarahkan diatas ialah porsi jumlah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Sidik, Mahi, Simanjuntak, & Brodjonegoro, 2002)

Setiap daerah memiliki kemampuan dalam melakukan perhitungan DAU yang menjadi bagiannya, hal tersebut dapat mendukung penataan APBD dengan tidak menanti keluarnya keputusan presiden mengenai pengelompokan APBD.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Menurut Oktora & WinstonPontoh (2013), menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh dari daerah tersebut serta digunakan untuk modal awal pemerintah daerah guna membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah dalam mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 79 bahwa pendapatan asli daerah terdiri atas beberapa bagian, diantaranya:

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa iuran dilakukan

oleh pribadi/perorangan atau badan terhadap daerah tanpa imbalan yang langsung dan seimbang serta dapat dipaksa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku, setelah itu akan digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah. Pada umumnya Pajak Daerah dibedakan atas 2 kategori, yaitu:

- a. Pajak Daerah Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak atas Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea atas Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan.
- b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - 1) Pajak atas Hotel dan Restoran
 - 2) Pajak atas Hiburan
 - 3) Pajak atas Reklame
 - 4) Pajak atas Penerangan Jalan
 - 5) Pajak atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - 6) Pajak atas Parkir

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/perorangan atau badan. *Retribusi daerah* dapat dibedakan menjadi 3 atas kategori, yaitu:

- a. Retribusi atas pelayanan umum.
- b. Retribusi atas pelayanan usaha.
- c. Retribusi atas izin tertentu.

3. Hasil Badan Usaha Milik Daerah

Perizinan yang tertuang dalam peraturan UU No. 54 Tahun 2007 bahwa pemerintah daerah diperbolehkan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bersama dengan sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberi peran kepada daerah agar dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah. Laba perusahaan daerah yang di peroleh juga merupakan salah satu sumber terhadap PAD juga bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri dari bagian keuntungan dari lembaga keuangan bank maupun non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/*investasi* kepada pihak ketiga.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam hal ini, pendapatan daerah yang sah bisa dalam pembiayaan belanja dari suatu daerah daerah menggunakan cara-cara yang umum dan tidak menyalahkan peraturan yang telah berlaku. Pilihan agar mendapatkan perolehan ini dapat dilaksanakan dengan cara meminjamka ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah lain, kemudian ke lembaga keuangan maupun non-keuangan, terhadap rakyat, penerbitan surat hutang daerah. (Nurzen & Riharjo, 2016).

2.5. Belanja Daerah

Untuk membiayai pengeluaran provinsi maka suatu daerah akan mencari bahkan pendapatan yang diraih berupa pendapatan dari provinsi ataupun dana perimbangan. Fungsi ataupun kegunaan dari belanja daerah sendiri merupakan suatu rangkauntuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilakukan bersama baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini diprioritaskan berdasarkan adanya pengeluaran pengadaan hal wajib bertujuan memberikan perlindungan dan peningkatan bobot aktivitas rakyat untuk dapat terpenuhnya tanggung jawab disuatu wilayah diciptakan melalui penambahan pelayanan awal, edukasi, healty, fasilitas umum dan social yang baik juga layak dalam peningkatan sistem tanggungan social.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari tabungan suatu provinsi dari masa waktu pertahun juga meminimkan harta dari suatu pemerintah provinsi. Pada bentuk pembiayaan wilayah bersama peningkatan kualitas, fungsi, kelompok, dan jenis belanja.(Kolinug, Kumenaung, & Rotinsulu, 2015)

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pedoman penyelenggaraan keuangan daerah disebutkan apabila belanja daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai nilai kekayaan bersih. Semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, kegunaan dari belanja daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kebijakan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan pilihan, urusan wajib dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dikerjakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Melalui proses pemudahan dalam menilai kepastian anggaran pada sebuah rencana atau program, adapun menurut pembagiannya belanja daerah dibagi kedalam dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang dimaksud dengan belanja tidak langsung ialah jenis belanja yang disalurkan dengan kaitan secara tidak langsung bersama pekerjaan rencana dan kegiatan. Adapun jenis-jenis dari belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, pinjaman social, belanja bagi hasil, pinjaman pendanaan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang disalurkan dengan kaitan dengan cara langsung pada pemberlakuan rencana dan kegiatan. adapun jenis-jenis dari belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. (Aggeraini & Suhardjo, 2010)

2.6. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Hasil Pengujian memperlihatkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin besar DAU akan semakin besar belanja daerah. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan menganggarkan peningkatan belanja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan. Pemerintah daerah

lebih memilih mengusahakan penerimaan dana alokasi umum yang lebih banyak dari pada melakukan peningkatan pada pemasukan dari wilayahnya yang bisa berakibat pada pengangguran dana alokasi umum. Dana alokasi umum ialah akar dari pendanaan yang menonjol serta bias menambah layanan dikhalayak yang merupakan misi desentralisasi yakni meningkatkan ekspansi dan mengoptimalkan kualitas wilayah agar dapat memenuhi keperluan provinsi. (Nashiri & Amanah, 2018).

Hasil tersebut mendapat dukungan dari penelitian yang dikerjakan oleh Aprilia & Saputra (2013). Pada referensi ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah dibahas secara cukup luas sejak akhir tahun 1950-an dan berbagai dugaan tentang hubungan tersebut diuji secara empiris. (Chang & Ho, 2002).

2.7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Hasil Pengujian memperlihatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh dengan belanja daerah. Hasil tersebut juga memperlihatkan bertambahnya pendapatan yang nyata dari suatu daerah akan semakin meningkatkan belanja daerah. Tinggi tingkat pendapatan asli yang diperoleh akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biayai sehingga belanja daerah yang lebih banyak. Semakin tinggi tingkat pendapatan asli

daerah menjadikan proporsi penerimaan dan pengeluaran mendekati ideal, artinya apabila penerimaan dapat mengalami peningkatan, tentunya berdasarkan jumlah yang dikeluarkan dapat mengalami peningkatan begitu juga kebalikannya apabila penerimaan mengalami penurunan maka pengeluaran pun mengalami penurunan pula. (Nashiri & Amanah, 2018).

2.8. Penelitian Terdahulu

1. Nashiri & Amanah (2018)

Pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh DAU, DBH, dan PAD Terhadap Belanja Daerah Dan Analisis Flypaper Effect” menunjukkan pada “Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan Pemerintah daerah lebih memastikan dan mengupayakan perolehan dana alokasi umum yang lebih besar sebagai sumber dana guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat; Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Kondisi ini memperlihatkan tingkatnya DBH memperlihatkan sumberdana yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pendapatan APBN semakin besar. Hal ini tentu akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja yang lebih besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif

signifikan dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Hasil ini memperlihatkan semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah menjadikan proporsi pendapatan dan konsumsi mendekati ideal, artinya jika pendapatan meningkat maka tentunya secara proporsional konsumsipun juga akan meningkat sebaliknya jika pendapatan menurun maka konsumsi pun akan menurun pula; Hasil pengujian memperlihatkan tingkat koefisien regresi DAU lebih besar dari tingkat koefisien regresi yang dimiliki oleh PAD. Kondisi ini memperlihatkan ditemukannya *flypapereffect*, artinya kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU daripada PAD.

2. Dewi I, Koleangan, & Engka (2017)

Hasil dari penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung. Berdasarkan data time series tahun 2005-2015 dan diolah berdasarkan metode analisis regresi berganda untuk pengujian analisis alur yang dipakai dapat di ketahui bahwa hubungan antara DAU, DAK, PAD terhadap kemiskinan melalui belanja daerah ialah memiliki hubungan negatif. Dimana penurunan 1% kemiskinan merupakan kontribusi dari PAD sebesar 0,6216%, DAU sebesar 4,7930% dan DAK sebesar 0,2101% melalui belanja daerah kota bitung. Sedangkan

secara keseluruhan diketahui bahwa apabila terjadi kenaikan 1% pada belanja daerah maka akan terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,1856%.

3. Ernayani (2017)

Pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah, bahwa hasil penelitiannya menunjukkan Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus mempengaruhi belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Kalimantan timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa R square adalah 0,892 atau 89,2% berarti bahwa belanja daerah dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan sisanya 10,8% dipengaruhi oleh factor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Priambudi (2017)

Pada Penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{1y}) sebesar 0,862, koefisien determinasi (r^2_{1y}) 0,744; thitung 17,539 lebih besar ttabel 1,98282. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{2y}) sebesar 0,610; koefisien determinasi (r^2_{2y}) 0,372; thitung 7,920 lebih besar ttabel 1,98282. Kemudian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal.

5. Aditiya & Dirgantari (2017)

Didalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015 menjelaskan pada penelitian ini melalui Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sensus, sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis dengan tingkat signifikan (α) 0,05. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Moda.

6. Susanti & Fahlevi (2016)

Pada penelitian yang ditelitinya berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014. Sedangkan secara parsial DAU, PAD, dan DBH juga berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh pada periode 2011-2014.

7. Kolinug, Kumenaung, & Rotinsulu (2015)

Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado terdapat melalui hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah dan pengaruh PAD terhadap BD lebih besar dari pada pengaruh DAU terhadap BD serta memberikan bukti mengenai tidak adanya keberadaan *flypapereffect*. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Manado dalam memprediksi belanja daerah lebih mengutamakan kemampuan keuangannya sendiri yang di hasilkan dari penerimaan PAD.

8. Jolianis (2014)

Pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat dimana pada Penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan hasil Dana alokasi Umum dapat mengakibatkan penambahan terhadap jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah

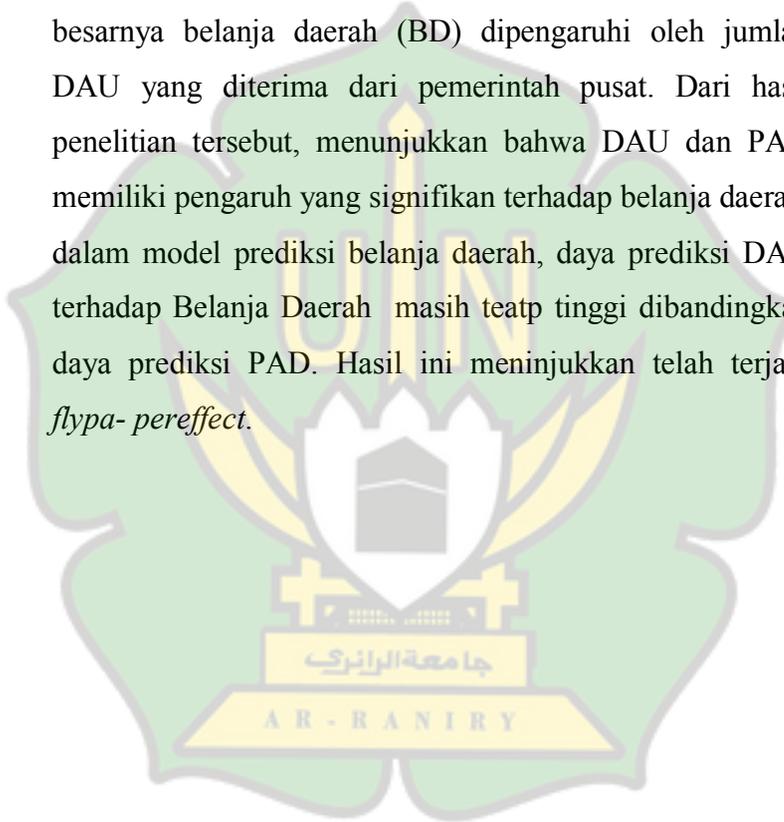
daerah. PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. peningkatan jumlah PAD yang akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

9. Devita, Delis, & Junaidi (2014)

Dalam Penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menjelaskan bahwa ketika diperhatikan dari pengaruhnya dengan menggunakan model *fixed effect*, dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan atau bersamaan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien.

10. Prakosa (2004)

Melalui penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah dimana secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah (BD) dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap Belanja Daerah masih tetap tinggi dibandingkan daya prediksi PAD. Hasil ini menunjukkan telah terjadi *flypa- pereflect*.



Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Model Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1	Nashiri & Amanah (2018) <i>"Pengaruh DAU, DBH, dan PAD Terhadap Belanja Daerah Dan Analisis Flypaper Effect"</i>	Kausalitas (causal research)	Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Persamaan : Hasil yang di temukan dari variabel X berpengaruh terhadap variabel Y Perbedaan : Penelitian ini menggunakan 3 Variabel x (dependent) dan menggunakan Analisis Flypaper Effect
2	Dewi I, Koleangan, & Engka (2017) <i>"Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung"</i>	Regressi Linier Berganda	Hubungan antara DAU, DAK, PAD terhadap kemiskinan melalui belanja daerah ialah memiliki hubungan negatif.	Persamaan: Hasil yang diperoleh pada penelitian ini mendapatkan hasil yang signifikan yang sama dan menggunakan metode yang sama. Perbedaan: pada penelitian meneliti kemiskinan yang melalui Belanja Daerah.

Tabel 2.1
Lanjutan

3	Ernayani (2017) <i>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah”</i>	Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.	Persamaan : Menggunakan Regresi Linier Berganda Perbedaan: Menggunakan 4 Variabel X
4	Priambudi (2017) <i>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah”</i>	Simple Regression dan Multiple Regression	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal	Persamaan: Hasil yang diperoleh pada penelitian ini mendapatkan hasil yang signifikan dari kedua variabel. Perbedaan: pada penelitian ini menggunakan variabel Y berupa Belanja modal, dimana belanja modal tersebut merupakan poin atau item dari Belanja daerah.

Tabel 2.1
Lanjutan

5	<p>Aditiya & Dirgantari (2017) <i>"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015"</i></p>	<p>Regresi Linier Berganda dengan Pengambilan sampel menggunakan metode sensus.</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal</p>	<p>Persamaan: Hasil yang di peroleh pada penelitian ini, dimana variabel X memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y. Perbedaan: Memiliki Variabel X yang lebih dari dua variabel dan Juga menggunakan Variabel Y berupa Belanja Modal yang merupakan poin dari Belanja Daerah, dan juga penelitian ini menggunakan metode sensus.</p>
---	---	---	--	---

Tabel 2.1
Lanjutan

6	<p>Susanti & Fahlevi (2016) <i>“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)”</i></p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil baik secara simultan dan parsial memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal</p>	<p>Persamaan: Hasil yang di peroleh baik secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang positif dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dan juga lokasi penelitian yaitu Aceh. Perbedaan: Memiliki variabel X yang lebih dari dua variabel dan Juga menggunakan Variabel Y berupa Belanja Modal yang merupakan poin dari Belanja Daerah,</p>
---	--	--------------------------------	---	--

Tabel 2.1
Lanjutan

7	Kolinug, Kumenaung, & Rotinsulu (2015) “ <i>Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kota Manado</i> ”	Ordinary Least Squares (OLS)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Pemerintah Daerah (BD), sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan.	Persamaan: Menggunakan 2 Variabel X dan menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) Perbedaan: Terdapat hasil yang pengaruh yang tidak signifikan dari satu Variabel
8	Jolianis (2014) “ <i>Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat</i> ”	Regresi Linier Berganda	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.	Persamaan: Menggunakan 2 Variabel X dan menggunakan Regresi Linier Berganda Perbedaan: Menggunakan Kabupaten/Kota sebagai sampel
9	Devita, Delis, & Junaidi (2014) “ <i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi</i> ”	Regresi Data Panel	ketika diperhatikan dari pengaruhnya dengan menggunakan model <i>fixed effect</i> , dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan atau bersamaan dan parsial dapat meningkatkan Belanja Daerah	Persamaan: Memiliki pengaruh dan hasil yang sama Perbedaan: Menggunakan 3 Variabel X, Menggunakan Regresi Data Panel dan model <i>Fixed Effect</i>

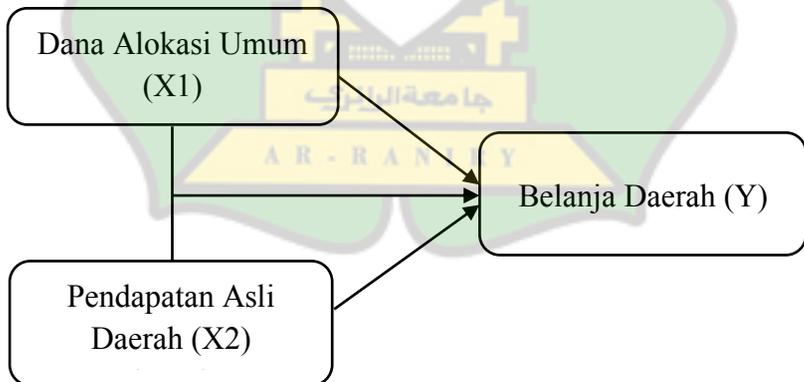
Tabel 2.1
Lanjutan

10	<p>Prakosa (2004) <i>“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah”</i></p>	<p>Simple Regressi on dan Multiple Regressi on</p>	<p>Dari hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi BJD, daya prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi flypaper effect.</p>	<p>Persamaan: Memiliki 2 Variabel X yang sama Perbedaan: menggunakan regresi sederhana dan berganda</p>
----	---	--	---	--



2.9. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ini bertujuan menggambarkan konsep penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga diharapkan dapat menunjukkan alur berpikir dalam menyusun pembahasan ini. Kerangka pemikiran juga dijelaskan menurut Kolinug, Kumenaung, & Rotinsulu (2015) dimana DAU yang berasal dari pemerintah pusat berperan sebagai dana perimbangan dapat mempengaruhi belanja daerah, kemudian PAD yang juga termasuk kedalam pangkal pemsukan wilayah pribadi juga mempengaruhi belanja daerah dan meningkatkan kemandirian daerah. dengan demikian jika DAU dan PAD mengalami peningkatan yang besar akan mampu membiayai pengeluaran pada belanja daerah. Sehingga didapatkan kerangka berfikir berikut:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir

2.10. Hipotesis

Dugaan awal untuk pengujian apakah benar atau tidak dengan cara melihat dari hasil analisis penelitian merupakan pengertian dari hipotesisi. Berikut hipotesis yang dikeluarkan pada penelitian yaitu:

Ho = Diduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Aceh.

Ha1 = Diduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Aceh.

Ho = Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Aceh.

Ha2 = Diduga bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Aceh.

Ho = Diduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Aceh.

Ha3 = Diduga bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah Aceh.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena pada penelitian ini menggunakan angka-angka analisis yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan metode statistika (Azwar, 2007). Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur sehingga dapat menggunakan statistik dalam pengujiannya (Kountur, 2004). Dari segi tujuan pada penelitian kuantitatif, rancangan ini digunakan terhadap percobaan sebuah konsep, disajikan melalui satu bukti atau mendefinisikan perangkaan, serta untuk memperlihatkan ikatan beberapa variabel yang bersifat meningkatkan rancangan, meningkatkan pengetahuan, serta menjabarkan beberapa perihal yang berkaitan. (Subana & Sudrajat, 2005).

3.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini memakai jenis data sekunder. Data sekunder menurut Dajan dalam (Anggeraeni & Suhardjo, 2010) merupakan data yang yang didapat secara tidak langsung melainkan melewati media perantara dan dikumpulkan pihak lain, kemudian peneliti menggunakannya guna menyempurnakan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan merupakan data Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan belanja pemerintah daerah provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai

2019. Kemudian data tersebut diinterpolasikan menjadi triwulan untuk setiap tahunnya, sehingga dapat menghasilkan total sampel sebanyak 40.

3.3. Variabel Penelitian

3.3.1. Klasifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel yang terbagi terbagi dua yaitu variable dependen dan variable independen. Adapun variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variable dependennya adalah Belanja Pemerintah Daerah.

3.3.2. Devinisi Operasional Variabel

1. Belanja Pemerintah Daerah sebagai variable dependen(Y) merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Indikator pada belanja daerah ialah: belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer, pengeluaran tidak terduga.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen (X1) merupakan salah satu variable bauran pada belanja daerah yang merupakan transfer pada dana pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan dalam pelaksanaan desentralisasi.

Adapun indikator pada DAU ialah:

- 1) Dari indikator kebutuhan daerah, yang terdiri dari, belanja daerah rata-rata, luas daerah, harga bangunan, kemiskinan relatif.
- 2) Dari penerimaan daerah, yang terdiri dari: pemasukan daerah, industry, sumber daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM).
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variable independen (X_2) juga merupakan elemen bauran pada belanja daerah yang bias dikatakan PAD merupakan pendapatan terbesar pada suatu daerah dikarenakan PAD bersumber dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Indikator yang terdapat pada PAD ialah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah (Hemawan, Made, & Y, 2016).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang logis dalam mengumpulkan, mencatat dan menyajikan kenyataan terhadap arah khusus disebut dengan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengarsipan dokumen. Cara untuk melakukan langkah pengarsipan melalui penemuan dan merangkum data-data yang memiliki hubungan dengan penelitian

ini. Dokumen yang dimaksud di sini ialah dokumen yang merupakan data-data yang diambil pada instansi-instansi seperti BPS.

3.5. Model Analisis

Adapun bentuk Analisa pada penelitian ini ialah persamaan regresi linier berganda (*multiple regression*). Mengurangi nilai dari kuadrat kesalahan dengan menggunakan penjabaran *Ordinary Least Squares* (OLS) merupakan system untuk mengetahui nilai persamaan.

3.5.1. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan dan menganalisa hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial. Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti, apabila peneliti meramalkan seperti apa kondisi siklus variabel terikat, apabila memiliki lebih dari dua variabel bebas selaku bagian aspek predictor kondisi siklus. Oleh karena itu penganalisaan pada *regresi berganda* dapat digunakan apabila nilai variabel bebasnya sedikitnya lebih dari satu variabel (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan persamaan regresi

linier berganda karena variable bebas dalam penelitian ini lebih dari satu.

Rumus yang digunakan persamaan regresi linier berganda ini ialah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad \text{(Rumus 3.1)}$$

Dimana:

Y	= Variabel terikat
a	= Konstanta
β	= Koefisien variable regresi
X	= Variabel bebas
e	= Error term

3.6. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik diuji bertujuan agar dapat melihat baik atau tidak jenis regresi tersebut sebagai penilaian. Sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) merupakan suatu model atau jenis yang dikatakan baik, yaitu memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dapat dilakukan melalui beberapa pengujian yaitu: uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.6.1. Uji Multikolinearitas

Dalam asumsi regresi linear klasik, antar variabel independen tidak diijinkan untuk saling kolerasi. Salah satu Uji yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah model

regresi terdapat kolinearitas antara variabel bebas disebut uji multikolinearitas. Jika terdapat gejala yang bersangkutan dapat berimbas pada tingkat varian koefisien yang cukup besar dan memiliki dampak pada tingkat kepercayaan terhadap variabel bebas. (Gujarati, 2006).

3.6.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan agar pengujian pada model regresi menemukan ada atau tidaknya korelasi diantara variabel bebas. Jika tidak terdapat gejala heteroskedastisitas maka pengujian tersebut tergolong dalam model regresi yang baik. Pengujian ini terjadi jika situasi pada model regresi yang tidak terdeteksi mengalami perubahan.

3.6.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi yang tinggi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (Ghozali, 2007). Model regresi yang baik harus terhindar dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi dan tidak bagus serta tidak cocok untuk diasumsikan melalui persamaan. Pada pengujian autokorelasi ini menggunakan jenis atau cara dengan Durbin Watson test.

3.6.4. Uji Normalitas

Untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengguna atau residual dinyatakan terdistribusi normal maka dapat dilakukan menggunakan pengujian normalitas. Jika pada anggapan tersebut terjadi pelanggaran maka pengujian statistik tidak sesuai dengan kecilnya sampel. Metode yang digunakan dalam pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogrov Smirnov.

3.7. Pengujian Hipotesis.

Tahapan dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menentukan jawaban apakah dugaan awal pada penelitian ditolak atau diterima. Pengujian hipotesis menjadi sebuah cara riset dengan pendekatan kuantitatif. Perhitungan statistik dapat dikatakan signifikan jika pada jumlah pada pengujian hitungannya terdapat pada tempat yang tidak baik (H_0 ditolak). Begitu juga kebalikannya dikatakan tidak signifikan apabila hasil dari pengujian hitungannya terdapat pada tempat yang baik (H_0 diterima). (Gujarati, 2003)

3.7.1. Uji Hipotesis Secara Simultan (*Uji F*)

Pada dasarnya uji hipotesis secara simultan (*uji F*) dapat menampilkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara

sumultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun cara untuk mengetahui uji hipotesis secara simultan (uji F) bias dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Jika jumlah angka pada Fhitung bernilai besar ($>$) dari jumlah angka pada Ftabel, dugaan awalnya diterima artinya seluruh variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut (Gujarati, 2006):

- $H_0: \beta_0, \beta_1, \beta_2 = 0$ (nol), Semua variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_1: \beta_0, \beta_1, \beta_2 \neq 0$ (nol), Semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.

Adapun syarat untuk pengujian ini ialah:

- Jika pada nilai Fhitung memiliki jumlah yang lebih kecil ($<$) dari Ftabel, dapat disimpulkan penolakan pada H_1 kemudian H_0 diterima.
- Jika pada nilai Fhitung memiliki jumlah yang lebih besar ($>$) dari Ftabel, dapat disimpulkan H_1 diterima dan terjadi penolakan pada H_0 .

3.7.2. Uji Hipotesis Secara Parsial (*Uji t*)

Pada dasarnya pengujian hipotesis secara parsial (*Uji t*) dapat memperlihatkan besarnya kaitan suatu variabel bebas dengan cara parsial dapat menjelaskan *variation* variabel terikat. Pengujian

hipotesis secara parsial berfungsi untuk mendapatkan kebenaran terhadap hal yang baik pada model regresi dalam menduga. Untuk mengetahui mengenai uji hipotesis parsial (uji t) terdapat beberapa kriteria pengujian yaitu apabila t hitung ($>$) pada t statistik, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian apabila t hitung ($<$) pada t statistik, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kemudian dengan membandingkan nilai signifikansi berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) Dimana apabila nilai Sig. lebih kecil ($<$) dari 0,10 maka hipotesis diterima. Sebaliknya apabila nilai Sig. lebih besar ($>$) dari 0,10 maka hipotesis ditolak.

3.7.3. Koefisiensi determinasi (*R square*)

Pada intinya Koefisien determinasi (*R square*) memiliki tujuan guna untuk mengetahui besarnya kekuatan pada jenis regresi dalam menjelaskan *variation* variabel independennya. Fungsi dari pengujian *R square* ini dipakai agar mampu menerangkan kebiasaan pada model regresi untuk mengira variabel terikatnya. Apabila nilai koefisien meningkat atau besar, variabel bebas akan mampu menerangkan variabel terikat. Jika jumlah R^2 terbilang baik maka semua dapat dijelaskan dari vadapat bebas pada jenisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya terdapat di Banda Aceh. Aceh menempati pada wilayah ujung bagian barat pulau Sumatera dan Negara Indonesia. Secara geografis aceh terlerak antara 2°-6° lintang utara dan 95°-98° lintang selatan dengan ketinggian rata-rata 125 meter diatas permukaan laut. Batas- batas wilayah Aceh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dari perbatasan dengan Sumatera Utara dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Aceh juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa, kemudian Aceh juga diberikan kewenangan otonomi khusus.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2020

**Gambar 4.1
Peta Wilayah Povinsi Aceh**

Provinsi Aceh memiliki 18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan jumlah kecamatan sebanyak 289 Kecamatan, dari jumlah kecamatan yang ada terdapat 6.517 Desa atau gampong yang tersebar diseluruh wilayah Aceh. Daerah Aceh memiliki luas wilayah sebesar 57.956 km². Adapun jumlah penduduk yang ada pada provinsi Aceh pada tahun 2018 tercatat mencapai 5.281.314 jiwa sedangkan pada tahun 2019 tercatat mencapai 5.371.532 jiwa dapat dilihat pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Provinsi Aceh menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2019.

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
	2018	2019
SIMEULUE	92.393	93.228
ACEH SINGKIL	121.681	124.101
ACEH SELATAN	235.115	238.081
ACEH TENGGARA	212.417	216.495
ACEH TIMUR	427.567	436.081
ACEH TENGAH	208.505	212.494
ACEH BARAT	205.971	210.113
ACEH BESAR	417.302	425.216
PIDIE	439.131	444.976
BIREUEN	461.726	471.635
ACEH UTARA	611.435	619.407
ACEH BARAT DAYA	148.111	150.393
GAYO LUES	92.602	94.100
ACEH TAMIANG	291.112	295.011
NAGAN RAYA	164.483	167.294
ACEH JAYA	91.087	92.892
BENER MERIAH	145.086	148.175
PIDIE JAYA	158.091	161.215
BANDA ACEH	265.111	270.321
SABANG	34.571	34.874
LANGSA	174.318	176.811
LHOKSEUMAWE	203.284	207.202
SUBULUSSALAM	80.215	81.417
ACEH	5.281.314	5.371.532

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2020

4.2. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini memakai 3 (tiga) data, yaitu data Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan data tentang Belanja Daerah Provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 (Juta Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Daerah
2010	621,075	811,176	7,528,516
2011	716,646	805,179	7,374,625
2012	911,081	901,720	8,757,320
2013	1,092,446	1,309,623	11,217,741
2014	1,201,613	1,731,131	12,045,847
2015	1,237,895	1,972,049	12,135,636
2016	1,263,871	2,060,181	12,119,713
2017	2,060,263	2,276,306	13,832,849
2018	2,060,263	2,359,385	12,306,306
2019	2,126,193	2,481,629	17,105,507

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2020

4.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum telah terdistribusi selama 20 tahun, dimulai pada tahun 2001 sampai 2020, memiliki tujuan agar dapat meningkatkan pemerataan kesanggupan keuangan antar daerah. Sejak adanya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan pusat dengan daerah yang menyatakan bahwa DAU dialokasikan kepada daerah berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan belanja daerah masing-masing, sebagaimana yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka pada saat itulah DAU dialokasikan.

Aceh salah satu wilayah penerima Dana perimbangan yang didalamnya terdapat DAU. Berikut data Dana Alokasi Umum yang ada di Aceh selama 10 tahun terakhir:

Tabel 4.3. Data Dana Alokasi Umum dan Laju Peningkatan Provinsi Aceh Tahun 2010 sampai 2019 (Juta Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU)	Laju Peningkatan
2010	621,075	0
2011	716,646	15.39%
2012	911,081	27.13%
2013	1,092,446	19.91%
2014	1,201,613	9.99%
2015	1,237,895	3.02%
2016	1,263,871	2.10%
2017	2,060,263	63.01%
2018	2,060,263	0%
2019	2,126,193	3.20%

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel diamati bahwa penggunaan DAU pada Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya dan juga terdapat jumlah yang peningkatan hanya sebesar 0% yang artinya pada tahun tersebut tidak ada penambahan nilai DAU dari pemerintah pusat. Penggunaan DAU yang tepat sasaran akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adapun penggunaan dari DAU ini ialah pada sektor pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Hal ini seharusnya dapat mendorong tingkat kemiskinan di Aceh.

4.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu pemasukan dari daerah dengan berlandaskan pada konstitusi yang diatur sesuai UU. Provinsi Aceh sudah ada PAD sejak tahun 1994 sampai sekarang. Adanya PAD bermaksud memberikan wewenang dan membentuk suatu wilayah dalam menalani otonomi daerah berdasarkan dengan kemampuan wilayah dalam mewujudkan desentralisasi. Berikut merupakan jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh dari tahun 2010 sampai 2019 beserta dengan sumber-sumbernya:

Tabel 4.4. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh dari tahun 2010 sampai 2019 (Juta Rupiah)

No	Jenis Pendapat/ <i>Kind of Revenues</i>	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/<i>Regional Revenue</i>	811,176	805,179	901,720	1,309,622	1,731,131
1.1	Pajak Daerah/ <i>Regional Tax</i>	521,326	586,129	687,477	752,719	1,030,679
1.2	Retribusi Daerah/ <i>Regional Retribution</i>	7,493	9,416	6,318	6,346	3,701
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ <i>Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>	98,845	66,015	96,317	123,629	134,013
1.4	zakat/ <i>Infaq</i>	30,648	12,826	10,278	13,299	25,176
1.5	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>	152,863	130,794	101,330	413,629	537,561

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2020

Tabel 4.4. Lanjutan

No	Jenis Pendapat/ <i>Kind of Revenues</i>	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/<i>Regional Revenue</i>	1,972,049	2,060,181	2,276,306	2,359,385	2,481,629
1.1	Pajak Daerah/ <i>Regional Tax</i>	1,172,685	1,252,745	1,315,394	1,309,082	1,509,791
1.2	Retribusi Daerah/ <i>Regional Retribution</i>	4,799	9,505	8,051	20,763	28,864
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ <i>Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>	165,103	176,799	180,888	181,654	196,935
1.4	zakat/ <i>Infaq</i>	-	-	53,902	53,929	50,248
1.5	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Regional Revenue</i>	629,461	621,131	718,071	793,958	695,791

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat beberapa sumber pendapatan daerah Aceh melalui Pendapatan Asli Daerah di antaranya adalah pajak daera, retribusi daerah, kemudian hasil perusahaan milik daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian zakat, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah terbesar di provinsi Aceh. Dapat dilihat setiap tahunnya pajak daerah mengalami peningkatan, bahkan lebih dari 50% pendapatan dari pajak daerah dapat mengisi PAD provinsi Aceh. Terdapat beberapa jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restaurant dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, kemudian pajak penerangan jalan, kemudian pajak rokok dan masih ada pajak-pajak lainnya yang menjadikan pajak daerah sebagai pendapatan daerah yang terbesar pada sebuah daerah salah satunya pada provinsi Aceh.

4.2.3. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang merupakan kewajiban tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat, semakin banyak pendapatan yang mampu diperoleh suatu daerah maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya.

Berikut merupakan jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah daerah provinsi Aceh dari tahun 2010-2019:

Tabel 4.5. Jumlah Belanja Daerah Provinsi Aceh dari tahun 2010 sampai 2019 (Juta Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014
1	Belanja Tidak Langsung	2,408,249	2,527,577	3,408,377	3,464,276	5,580,021
1.1	Belanja Pegawai	787,605	811,498	774,594	819,279	870,169
1.2	Belanja Subsidi	599	0	0	0	0
1.3	Belanja Hibah	532,842	614,246	1,065,211	1,219,683	693,009
1.4	Belanja Bantuan Sosial	768,358	611,422	515,656	292,533	309,013
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/Desa	162,467	236,585	262,804	269,719	298,491
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Desa	150,000	204,186	693,635	801,680	3,407,472
1.7	Belanja Tidak Terduga	6,379	49,642	96,478	61,380	1,867
2	Belanja Langsung	5,120,267	4,847,048	5,348,941	7,753,466	6,465,826
2.1	Belanja Pegawai	248,507	252,925	303,249	484,530	535,129
2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,603,848	3,120,235	4,230,354	5,618,815	3,523,217
2.3	Belanja Modal	3,267,911	1,473,887	8,153,339	1,650,120	2,407,479
	Jumlah/Total	7,528,516	7,374,625	8,757,320	11,217,741	12,045,847

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2020

Tabel 4.5 Lanjutan

No	Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Belanja Tidak Langsung	5,629,812	6,028,564	7,165,446	3,921,683	6,613,785
1.1	Belanja Pegawai	899,105	928,937	2,237,661	2,252,421	2,534,904
1.2	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.3	Belanja Hibah	642,368	1,167,159	658,893	693,406	671,513
1.4	Belanja Bantuan Sosial	237,866	228,993	249,604	228,273	12,542
1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota/Desa	503,280	659,116	588,331	642,408	691,397
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Desa	3,343,547	3,035,461	3,340,552	105,125	2,647,231
1.7	Belanja Tidak Terduga	3,645	8,898	405	49	56,197
2	Belanja Langsung	6,505,823	6,091,149	6,667,402	8,384,623	10,491,723
2.1	Belanja Pegawai	435,005	421,302	503,676	617,005	784,271
2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,045,714	3,384,994	3,995,427	5,263,677	6,083,407
2.3	Belanja Modal	2,025,103	2,284,852	2,168,299	2,503,941	3,624,044
	<i>Jumlah/Total</i>	12,135,635	12,119,713	13,832,849	12,306,306	17,105,507

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, 2020

Belanja daerah diklasifikasikan jadi dua bagian, pertama yaitu belanja langsung, dimana didalamnya terdapat pembelanjaan untuk menjalankan program daerah diantaranya: belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kemudian yang kedua yaitu belanja secara tak langsung yang tergolong dalam pengeluaran daerah yang dikeluarkan secara tak langsung dengan berbagai rencana kegiatan yang dijalankan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa, dan belanja tidak terduga.

Sama seperti daerah-daerah lainnya Aceh juga memiliki proporsi pembelanjaan daerahnya, dapat dilihat dari tabel di atas, mengenai jumlah belanja daerah provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Terlihat bahwa pengeluaran pemerintah Aceh lebih dominan atau lebih besar pada belanja langsung dari pada belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran atau belanja daerah provinsi Aceh bisa dikatakan sangat ideal, dikarenakan belanja langsung ini memiliki sifat secara langsung dinikmati oleh masyarakat melalui program pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

4.3. Metode Analisa Data

4.3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan variabel independent Dana Alokasi Umum (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap variabel dependent Belanja daerah (Y), maka perlu di uji koefisiensi.

Tabel 4.6
Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.820	.406		14.319	.000
	DAU	.182	.095	.293	1.922	.062
	PAD	.391	.090	.660	4.334	.000

a. Dependent Variable: BD
Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil penelitian dari tabel di atas, dapat dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi dapat ditulis:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

- Y = Variabel terikat
- a = Konstanta
- β = Koefisien variable regresi
- X = Variabel bebas
- e = Error term

Dari output tersebut didapatkan model persamaan regresi berikut:

$$Y = 5,820 + 0,182 X1 + 0,391 X2 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Nilai koefisien pada variabel Dana Alokasi Umum (X_1) yaitu 0,182, artinya variabel Dana Alokasi Umum mempunyai kaitan/hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian bila Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,182 juta rupiah.
- b. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) sebesar 0,391, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai kaitan/hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sejumlah 1 juta rupiah, Belanja Daerah juga akan meningkat sebesar 0,391 juta rupiah.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat gejala kolerasi antara variable independent dan variable dependent. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menguji multikolinearitas dengan cara melihat nilai tolerance dan nilai *variance inflating factor* (VIF), dengan ketentuan jika nilai tolerance lebih besar ($>$) dari 0,10 maka artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas, begitu juga sebaliknya. Sedangkan ketentuan pada nilai VIF lebih kecil ($<$) dari 10,00 maka artinya tidak terjadi gejala multikolinearitas begitu juga sebaliknya. Hasil yang di peroleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	5.820	.406		14.319	.000		
	DAU	.182	.095	.293	1.922	.062	.139	7.218
	PAD	.391	.090	.660	4.334	.000	.139	7.218

a. Dependent Variable: BD
Sumber: Data diolah (2020)

Dari hasil output di atas yang diperoleh dari nilai Tolerance Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah, adalah 0,139 lebih besar ($>$) dari 0,10. Sedangkan yang di peroleh dari nilai VIF pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 7,218 dimana nilai tersebut lebih kecil ($<$) dari 10,00. Maka dilihat dari ketentuan tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi penelitian ini.

2. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (variasi) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain disebut pengujian heteroskedastisitas. Pada pengujian ini memakai cara/metode uji white melalui pencarian nilai chi square hitung menggunakan rumus $(n \times R \text{ Square})$ dimana “n” merupakan jumlah sampel. Adapun ketentuan dalam pengujian heteroskedastisitas ini apabila nilai chi square hitung lebih kecil ($<$) dari nilai chi square tabel maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya apabila nilai chi square hitung lebih besar ($>$) dari nilai chi square tabel maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil yang diperoleh dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji Heteroskedastisitas

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.463 ^a	.214	.172	.00288	1.232

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: res2

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan dari output ditabel 4.8 dan ketentuan yang sudah diterangkan sebelumnya dimana nilai/jumlah R square pada tabel senilai 0,214, kemudian untuk mencari chi square hitung maka $40 \times 0,214$ sehingga diperoleh hasil chi square hitung sebesar 8,56. Kemudian untuk mencari chi square tabel menggunakan 0,05 ; df (*degree of freedom*), untuk mencari nilai df memakai rumus $df = n-1$, dimana “n” merupakan jumlah sampel sebesar 40 sehingga memperoleh nilai df sebesar 39. Maka dari itu diperoleh nilai chi square tabel sebesar 54,572. Dengan demikian nilai chi square hitung sebesar 8,56 lebih kecil (<) dari nilai chi square tabel sebesar 54,572. Artinya berdasarkan ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Salah satu bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear baik sederhana maupun berganda disebut dengan uji autokorelasi. Adapun tujuan dari uji autokorelasi ialah agar mengetahui dalam model regresi linear terdapat kolerasi penggunaan terhadap kesalahan masa t dengan kesalahan yang mengganggu pada periode $t-1$ (sebeumnya). Pada pengujian ini menggunakan cara durbin-watson (DW) dengan pemberlakuan berikut:

- a) Jika nilai DW lebih kecil dari nilai dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka berarti rerdapat gejala autokorelasi
- b) Jika nilai DW terletak antara nilai dU dan $(4-dU)$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi.
- c) Jika nilai DW terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.939 ^a	.881	.875	.04012	1.852

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan output pada tabel 4.9, maka diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,852. Kemudian nilai ini akan dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel durbin Watson pada signifikansi 5% dengan rumus $(k ; N)$, dimana “k” merupakan jumlah variable independen yaitu 2 (dua), sementara “N” merupakan jumlah sampel yaitu 40 (empat puluh), maka $(k ; N) = (2 ; 40)$. Angka ini kemudian dilihat pada distribusi nilai tabel durbin-watson. Selanjutnya ditemukan nilai dL sebesar 1,3908 dan nilai dU sebesar 1,6000. Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas yaitu nilai dU sebesar 1,6000 lebih Kecil ($<$) dari pada nilai DW sebesar 1,852 dan nilai DW lebih kecil ($<$) dari nilai $(4 - dU) 4 - 1,600 = 2,4$. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah atau gejala autokorelasi.

4. Uji Normalitas

Uji Normalitas juga merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear baik sederhana maupun bergana. Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Pada penelitian ini menggunakan metode kolmogorov-smirnov dengan ketentuan, apabila besarnya nilai signifikansi lebih ($>$) dari 0,05 penyimpulannya ialah penelitian terdistribusi normal, begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil ($<$) dari 0,05 maka penelitian tersebut tidak terdistribusi tidak normal. Hasil yang diperoleh ialah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03908135
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.103
	Negative	-.131
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c

Sumber: Data diolah (2020)

Dari hasil output pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,083. Berdasarkan ketentuan di atas bahwasanya nilai signifikansi sebesar 0,083 lebih besar ($>$) dari pada 0,05. Artinya dapat ditarik kesimpulan penelitian ini terdistribusi normal.

4.3.3. Pengujian Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

Tujuan dari Pengujian hipotesis secara simultan (bersamaan) yaitu, supaya terlihat bagaimana pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat jika di uji secara bersama-sama. Untuk membuktikan hal tersebut maka terdapat dua ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari output tabel anova. Dimana apabila nilai Sig. lebih kecil ($<$) dari 0,10 maka hipotesis diterima. Artinya variable independent secara simultan memiliki pengaruh terhadap variable dependent. Sebaliknya apabila nilai Sig. lebih besar ($>$) dari 0,10 maka hipotesis ditolak. Artinya variable independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variable dependent.
- b. Berdasarkan perbandingan nilai Fhitung dan Ftabel. Apabila nilai Fhitung lebih besar ($>$) Ftabel, maka hipotesis di terima. Artinya variable independen secara simultan berpengaruh terhadap variable dependent.

Begitu juga sebaliknya apabila nilai F_{hitung} lebih kecil ($<$) dari pada F_{tabel} , maka hipotesis ditolak. Artinya variable independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variable dependent.

Hasil hipotesis dalam pengujian ini adalah:

Tabel 4.11
Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.441	2	.220	136.922	.000 ^b
	Residual	.060	37	.002		
	Total	.500	39			

a. Dependent Variable: BD
Sumer: Data diolah (2020)

Pada tabel di atas, diketahui nilai signifiansi sebesar 0,000. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan 0,000 lebih kecil ($<$) dari pada 0,10 maka hipotesis diterima. Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah.

Berdasarkan perbandingan dengan nilai F_{hitung} sebesar 136,922 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,23. Dapat diambil kesimpulan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar ($>$) dari nilai F_{tabel} . Artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah.

2. Uji t (Parsial)

Uji t bertujuan untuk mendeteksi apakah variable independent dari sebuah penelitian secara parsial berpengaruh terhadap variable dependent. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari output tabel anova. Dimana apabila nilai Sig. lebih kecil ($<$) dari 0,10 maka hipotesis diterima. Artinya variable independent secara parsial memiliki pengaruh terhadap variable dependent. Sebaliknya apabila nilai Sig. lebih besar ($>$) dari 0,10 maka hipotesis ditolak. Artinya variable independent secara parsial tidak berpengaruh terhadap variable dependent.
- b. Berdasarkan perbandingan nilai/jumlah thitung dan ttabel. Jika thitung memiliki nilai lebih dari ($>$) ttabel, kesimpulannya hipotesis di terima. Artinya variable independen secara parsial berpengaruh terhadap variable dependent. Begitu juga sebaliknya apabila nilai t hitung lebih kecil ($<$) dari pada t tabel, maka hipotesis ditolak. Artinya variable independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variable dependent.

Hasil hipotesis dalam pengujian ini adalah:

Tabel. 4.12
Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constan)	5.820	.406		14.319	.000		
DAU	.182	.095	.293	1.922	.062	.139	7.218
PAD	.391	.090	.660	4.334	.000	.139	7.218

a. Dependent Variable: BD
Sumber: Data diolah (2020)

Pada tabel di atas terdapat nilai signifikansi pada variable Dana Alokasi Umum (X1) sebesar 0,062 lebih kecil (<) dari 0,10 yang artinya variable Dana Alokasi Umum (X1) berpengaruh signifikan terhadap variable Y yaitu Belanja Daerah. Kemudian nilai signifikansi pada Pendapatan Asli Daerah (X2) sebesar 0,000 lebih kecil (<) dari pada nilai 0,10. Artinya Pendapatan Asli Daerah (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan perbandingan nilai t hitung pada Dana Alokasi Umum sebesar 1,922 lebih besar (>) dari nilai t tabel sebesar 1,68385, artinya Dana Alokasi

Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Selanjutnya nilai t hitung pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,334 lebih besar ($>$) dari nilai t tabel sebesar 1,68385, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

3. Uji Koefisien Determinasi (*R square*)

Pengujian *R square* bertujuan agar bisa melihat seberapa besar bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent mampu menjelaskan variabel dependent. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi;

Tabel 4.13

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.939 ^a	.881	.875	.04012

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Uji Koefisien Determinasi (*R square*)

Sumber: Data diolah (2020)

Dari tabel di atas diketahui besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu 0,939, dari output tersebut memperoleh nilai koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,881. Artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya

adalah sebesar 88,1%. Artinya terdapat 11,9% (100%-88,1%) varians variabel terikat yang dijelaskan pada faktor lain.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh tahun 2010-2019. Dapat dilihat melalui nilai koefisien DAU (X1) sebesar 0,182. Jika Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 1 rupiah maka dapat meningkatkan belanja daerah sebesar 0,182 rupiah. Kemudian nilai signifikan pada variabel DAU (X1) sebesar 0,062 lebih kecil dari 0,10 dan nilai t hitung sebesar 1,922 lebih besar (>) dari nilai t tabel sebesar 1,68385. Kondisi ini dapat memperlihatkan apabila DAU semakin besar atau mengalami peningkatan akan mempengaruhi peningkatan dan pengaruh yang besar belanja daerah. Hal ini berkaitan dengan UU No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi Aceh cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan dan memberi pelayanan publik atau pelayanan lainnya yang cukup baik.

Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan dari Keits Bambang Prakosa (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), bahwa Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

4.4.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh tahun 2010-2019. Dapat dilihat dari nilai koefisien PAD (X_2) sebesar 0,391. Dimana apabila terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 rupiah maka dapat meningkatkan belanja daerah sebesar 0,391 satuan. Kemudian nilai signifikan pada variabel PAD (X_2) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,10 dan angka thitung senilai 4,334 besar dari ($>$) nilai ttabel senilai 1,68385. Dari hasil ini memperlihatkan semakin tinggi Pendapatan Asli suatu daerah yang diperoleh dan pemanfaatannya yang baik dapat meningkatkan penyaluran dana untuk melakukan belanja daerah. Dari hasil

pengujian juga memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah provinsi Aceh memiliki pengaruh yang lebih tinggi dari pada Dana Alokasi Umum dapat dilihat melalui t-statistik koefisien yang lebih besar dan tingkat signifikannya jauh lebih rendah dari Dana Alokasi Umum. Jumlah perolehan pendapatan asli daerah meningkat akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biayai sehingga belanja daerah yang lebih banyak. Pendapatan Asli Daerah juga dikategorikan sebagai hasil dari pendapatan yang harus ditingkatkan pertumbuhannya dan dapat memperlihatkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam menghasilkan pemasukan-pemasukan guna untuk menjalankan otonomi daerah berdasarkan kemampuan suatu wilayah dalam mewujudkan *desentralisasi*.

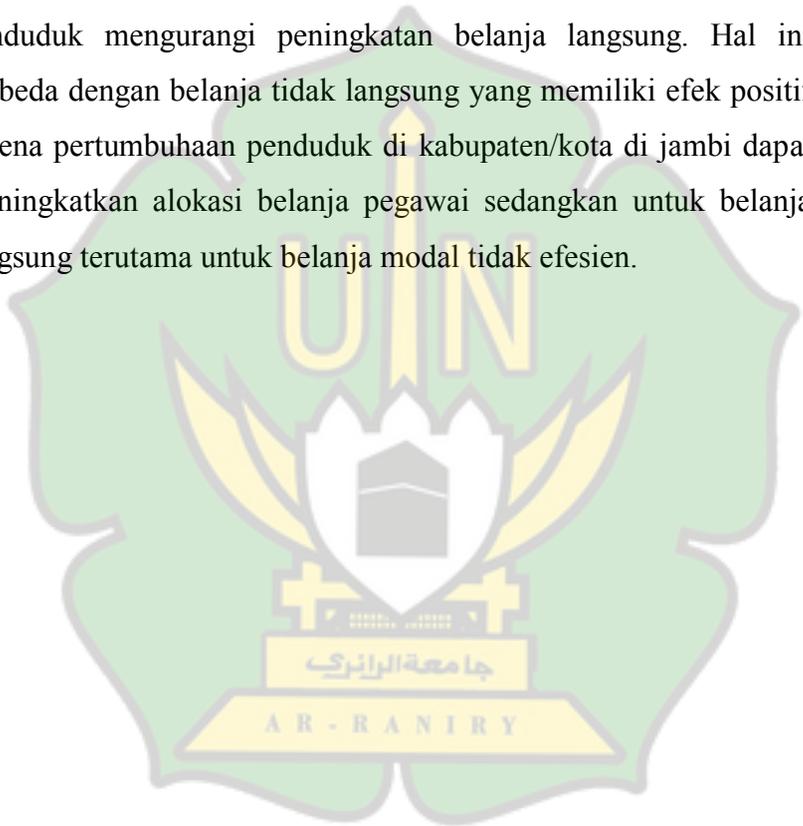
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan Aggeraini, U. D., & Suhardjo, Y. (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja pemerintah daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

4.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan terhadap belanja daerah provinsi Aceh. Hasil ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah maka semakin besar juga dana yang disalurkan untuk belanja daerah. Dana Alokasi umum adalah bagian dari dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat karena nilainya cukup mempengaruhi. Dana Alokasi Umum juga bagian dari poin pendanaan terhadap belanja daerah yang bertujuan pemberian pelayanan public yang berkualitas terhadap rakyat baik itu secara langsung ataupun tidak.

Dilihat dari hasil penelitian di atas peran pendapatan asli daerah dapat dikatakan lebih besar pengaruhnya dikarenakan PAD juga akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk meningkatkan belanja daerahnya. Tingginya tingkat pendapatan asli yang diperoleh suatu daerah akan sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah, karena akan semakin banyak program kemakmuran masyarakat yang dapat mereka biaya sehingga dapat meningkatkan belanja daerah yang lebih banyak.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan pernyataan melalui penelitian yang dilakukan oleh Devita, Delis, & Junaidi (2014) yang menyatakan bahwa dapat dilihat bahwa PAD dan DAU secara simultan atau bersamaan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung. Hal ini berbeda dengan belanja tidak langsung yang memiliki efek positif karena pertumbuhan penduduk di kabupaten/kota di jambi dapat meningkatkan alokasi belanja pegawai sedangkan untuk belanja langsung terutama untuk belanja modal tidak efisien.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

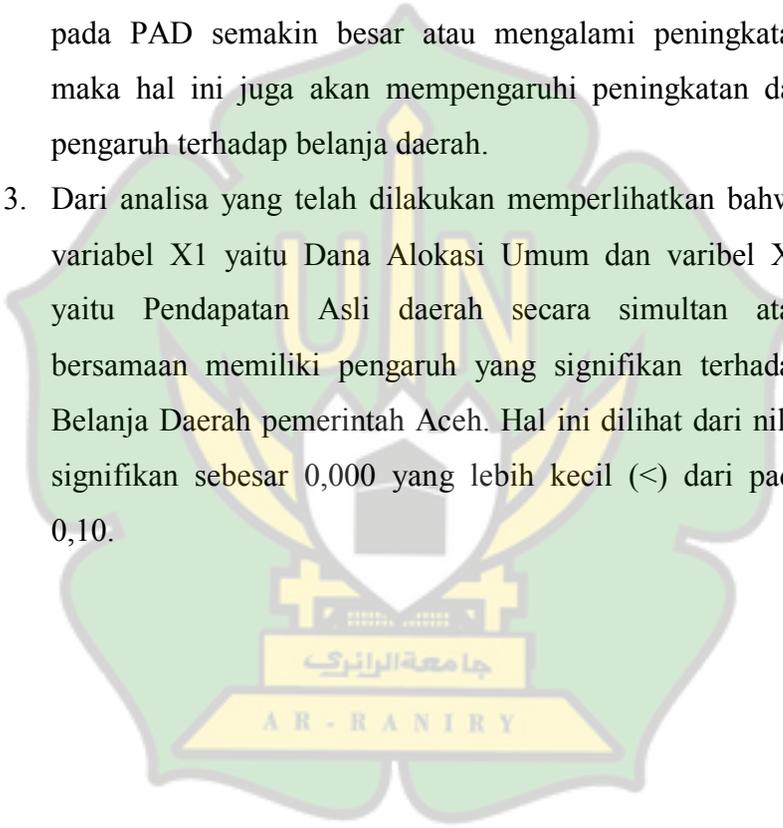
5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada variabel X1 yaitu Dana Alokasi Umum memiliki angka signifiaknsi sebesar $0,062 > 0,10$ dan t hitung sebesar $1,922 > t$ tabel sebesar $1,68385$, kemudian nilai koefisien sebesar $0,182$, artinya jika Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan belanja daerah sebesar $0,182$ juta rupiah. maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini memperlihatkan apabila pemasukan dari DAU semakin besar atau mengalami peningkatan maka hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan dan pengaruh terhadap belanja daerah.
2. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada variabel X2 yaitu Pendapatan Asli Daerah memiliki angka signifikansi sebesar $0,000 > 0,10$ dan t hitung sbesar $4,334 > \text{nilai } t$ tabel sebesar $1,68385$, kemudian nilai koefisien sebesar $0,391$, artinya jika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1 juta rupiah maka dapat meningkatkan belanja daerah sebesar $0,391$ juta rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dilihat dari angka yang ada pada PAD, menunjukkan bahwa PAD lebih besar pengaruhnya terhadap belanja daerah dibandingkan dengan DAU. Kondisi ini memperlihatkan apabila pemasukan yang ada pada PAD semakin besar atau mengalami peningkatan maka hal ini juga akan mempengaruhi peningkatan dan pengaruh terhadap belanja daerah.

3. Dari analisa yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa variabel X1 yaitu Dana Alokasi Umum dan variabel X2 yaitu Pendapatan Asli daerah secara simultan atau bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah Aceh. Hal ini dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil ($<$) dari pada 0,10.



5.2. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, diharapkan untuk meningkatkan pendapatan pada sumber yang terdapat melalui Pendapatan Asli Daerah dengan cara intensifikasi maupun ekstensifi, agar Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan melalui satu tahun ke tahun selanjutnya dan alokasi untuk belanja daerah juga ikut meningkat dan dapat menciptakan kemandirian daerah. Kemudian pemerintah daerah provinsi Aceh juga perlu mengatur dan dapat menggunakan Dana Alokasi Umum secara tepat sasaran dan lebih baik, dikarenakan Dana Alokasi Umum ini tergolong kedalam salah satu dana perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat.
2. Untuk peneliti kedepannya disarankan supaya bisa meluaskan pembahsan yang layak digunakan pada penelitian selanjutnya supaya lebih leluasa, dan lengkap, serta berfariasi. Adapun pembahasan yang ditambah dapat menggunakan pada seperti Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, 43.
- Aggeraini, U. D., & Suhardjo, Y. (2010). Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah KAbupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal SOLUSI*, 74.
- Aprilia, N., & Saputra, A. (2013). Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi 3(2)*, 107- 131.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastian, I. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- BPS. (2013-2017). Statistik Keuangan Pemerintah Aceh . 14-17.
- Chang, T., & Ho, Y.-H. (2002). Tax or Spend, what cause what: Taiwan's Experience. *International Journal of Business and Economics 1(2)*, 157-165.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 63-65.

- Dewi I, S. P., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2017). Analisis Pengaruh PAD,DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 1.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 43-46.
- Ghozali, I. (2007). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Empat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Ekonometri Dasar*. (S. Zain, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hemawan, A. D., Made, A., & Y, D. W. (2016). Pengaruh pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dnana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama* , 6-7.
- Jolianis. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi*, 57.
- Kolinug, F. C., Kumenaung, A. G., & Rotinsulu, D. C. (2015). Analisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah kota manado. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 1-10.

- Kountur, R. (2004). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Mardiosmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nashiri, F. I., & Amanah, L. (2018). Pengaruh DAU, DBH, dan PAD Terhadap Belanja Daerah dan Analisis Flypaper Effect. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 19-21.
- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4.
- Okora, F. E., & Winston Pontoh. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Beelanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability*, 4.
- Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. *JAAI*, 16.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, 136.
- Salam, D. S. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Bandung: Djambatan.
- Setiawan, Anjar. (2010) “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)”. Semarang. Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi Semarang.

- Sidik, M., Mahi, B. R., Simanjuntak, R., & Brodjonegoro, B. (2002). *Dana Alokasi Umum. Konsep, Hambatan, dan Prospek di era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kompas.
- Simanjuntak, B. A. (2017). *Konsepku Mensukseskan Otonomi Daerah: Membangun Indonesia Berkeadilan Sosial-Ekonomi (informasi rujukan deskriptif untuk ilmu antropologi politik, antropologi budaya, antropologi gender, antropologi desa, antropologi ekonomi, dan sosial ekonomi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Subana, & Sudrajat. (2005). *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfab
- Supriyatno, B. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 106-108.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 185-189.
- Tambunan, t. (2006). *Perekonomian Indonesia sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Lampiran 1

Data DAU, PAD dan Belanja Daerah Tahun 2010 sampai 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Daerah (BD)
2010	811,176,206,861	811,176,206,861	7,528,516,368,216
2011	805,179,231,294	716,646,172,000	7,374,625,289,279
2012	901,720,376,620	911,080,707,000	8,757,319,943,552
2013	1,309,622,500,492	1,092,445,518,000	11,217,741,311,905
2014	1,731,130,839,637	1,201,612,787,000	12,045,847,341,692
2015	1,972,049,032,901	1,237,894,986,000	12,135,635,484,500
2016	2,060,180,945,551	1,263,870,989,000	12,119,713,196,647
2017	2,276,305,568,813	2,060,263,235,000	13,832,848,610,133
2018	2,359,385,393,000	2,060,263,235,000	12,306,306,187,000
2019	2,481,629,033,000	2,126,193,327,000	17,105,507,222,000

Lampiran 2
Data Interpolasi

Tahun	PAD	DAU	Belana Daerah
2010Q1	209,000,000,000	152,000,000,000	1,980,000,000,000
2010Q2	204,000,000,000	153,000,000,000	1,900,000,000,000
2010Q3	200,000,000,000	156,000,000,000	1,840,000,000,000
2010Q4	198,000,000,000	160,000,000,000	1,810,000,000,000
2011Q1	198,000,000,000	166,000,000,000	1,800,000,000,000
2011Q2	199,000,000,000	174,000,000,000	1,810,000,000,000
2011Q3	202,000,000,000	183,000,000,000	1,850,000,000,000
2011Q4	206,000,000,000	194,000,000,000	1,910,000,000,000
2012Q1	204,000,000,000	210,000,000,000	2,020,000,000,000
2012Q2	215,000,000,000	222,000,000,000	2,120,000,000,000
2012Q3	231,000,000,000	234,000,000,000	2,240,000,000,000
2012Q4	252,000,000,000	245,000,000,000	2,380,000,000,000
2013Q1	289,000,000,000	259,000,000,000	2,640,000,000,000
2013Q2	314,000,000,000	269,000,000,000	2,770,000,000,000
2013Q3	340,000,000,000	278,000,000,000	2,870,000,000,000

Lampiran 2
Lanjutan

2013Q4	366,000,000,000	286,000,000,000	2,950,000,000,000
2014Q1	400,000,000,000	293,000,000,000	2,960,000,000,000
2014Q2	424,000,000,000	299,000,000,000	3,000,000,000,000
2014Q3	445,000,000,000	303,000,000,000	3,030,000,000,000
2014Q4	462,000,000,000	307,000,000,000	3,050,000,000,000
2015Q1	476,000,000,000	306,000,000,000	3,030,000,000,000
2015Q2	489,000,000,000	309,000,000,000	3,030,000,000,000
2015Q3	499,000,000,000	311,000,000,000	3,040,000,000,000
2015Q4	507,000,000,000	312,000,000,000	3,040,000,000,000
2016Q1	502,000,000,000	283,000,000,000	2,960,000,000,000
2016Q2	509,000,000,000	297,000,000,000	2,990,000,000,000
2016Q3	519,000,000,000	323,000,000,000	3,040,000,000,000
2016Q4	530,000,000,000	361,000,000,000	3,120,000,000,000
2017Q1	554,000,000,000	472,000,000,000	3,420,000,000,000
2017Q2	565,000,000,000	509,000,000,000	3,480,000,000,000
2017Q3	575,000,000,000	534,000,000,000	3,490,000,000,000
2017Q4	582,000,000,000	546,000,000,000	3,440,000,000,000
2018Q1	581,000,000,000	512,000,000,000	2,970,000,000,000
2018Q2	586,000,000,000	514,000,000,000	2,980,000,000,000

Lampiran 2 Lanjutan

2018Q3	593,000,000,000	516,000,000,000	3,080,000,000,000
2018Q4	600,000,000,000	519,000,000,000	3,280,000,000,000
2019Q1	607,000,000,000	523,000,000,000	3,580,000,000,000
2019Q2	616,000,000,000	528,000,000,000	3,980,000,000,000
2019Q3	625,000,000,000	534,000,000,000	4,480,000,000,000
2019Q4	634,000,000,000	541,000,000,000	5,070,000,000,000

Lampiran 3 Uji regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.820	.406		14.319	.000
	DAU	.182	.095	.293	1.922	.062
	PAD	.391	.090	.660	4.334	.000

a. Dependent Variable: BD

Lampiran 4 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.820	.406		14.319	.000		
	DAU	.182	.095	.293	1.922	.062	.139	7.218
	PAD	.391	.090	.660	4.334	.000	.139	7.218

a. Dependent Variable: BD

Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.463 ^a	.214	.172	.00288	1.232

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: res2

Lampiran 6 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.939 ^a	.881	.875	.04012	1.852

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Lampiran 7

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03908135
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.103
	Negative	-.131
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c

Lampiran 8

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.441	2	.220	136.922	.000 ^b
	Residual	.060	37	.002		
	Total	.500	39			

a. Dependent Variable: BD

Lampiran 9

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constan)	5.820	.406		14.319	.000		
DAU	.182	.095	.293	1.922	.062	.139	7.218
PAD	.391	.090	.660	4.334	.000	.139	7.218

b. Dependent Variable: BD

Lampiran 10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.939 ^a	.881	.875	.04012

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Uji R Square

Lampiran 11
Tabel F

df untuk penyeb ut (N2)	df untuk pembil ang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11

Lampiran 11

Lanjutan

37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95

Lampiran 12
Tabel t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793

Lampiran 12

Lanjutan

35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

